

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.

Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Setara Press.

Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Pertama)*. Setara Press.

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.

H. Elwi Danil. (2016). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers.

H. Soenarko Setyodarmodjo. (2012). *Memberantas Korupsi di Indonesia Sebuah Antologi (Pertama)*. Shira Media.

Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.

Hamzah, J. A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Tarmizi (ed.); Edisi Kedu)*. Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang – Undangan

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

3. Sumber Lain

Abadi, T., Elias, R. F., & Rompis, T. (2021). Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP. *Lex Crimen Vol. X/No. 7/Jan/2021*.

Aknes Susanty Sambulele. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP). *Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, II*.

Ginting, S. B. (2017). Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. *Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017*.

Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review, 3(1)*, 28–38.

Budiman, M. (2016). Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 18 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 1283 K/Pid.sus/2013. *Jurnal Yudisial, 9 No.3 (2016)*

Budiman, M. (2020b). Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. *jurnal Yudisial, 13 No.1 Ap*.

Tunardy, W. T. (2012). *Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum*.

Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013*.